



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2019**

SARILAMAK, SEPTEMBER 2018

PENGANTAR

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Renja mencakup materi yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2017 yang telah selesai dilaksanakan, *review* rancangan awal RKPD serta tujuan, sasaran dan prakiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018. Renja ini merupakan informasi fundamental mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2015 – 2020.

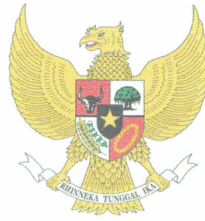
Semoga Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini dapat menjadi pondasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah lebih lanjut.

Payakumbuh, September 2018

Pjt. KEPALA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drs. ELNORA RIZA, M. Si
NIP. 19601002 198210 1 001



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 45);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2019.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2019.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
P E L A K S A N A A N

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2019 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2019 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2019.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2018.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 27 Juli 2018

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Juli 2018

PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 NOMOR 50



BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Peraturan Bupati Nomor 50 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (terlampir)

BAB I	: PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
	1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan KesbangPol.....	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbang Pol	II-8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan KesbangPol.....	II-9
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-10
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	II-17
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN	III-1
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbang Pol	III-2
	3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V	: PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Badan KesbangPol telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 28/BPKP-LK/2016 yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Badan KesbangPol selama 6 (enam) tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 45).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan Penyusunan renja dimaksud adalah :

1. Sebagai Acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan KesbangPol Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan KesbangPol, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan KesbangPol, analisis kinerja pelayanan Badan KesbangPol, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan KesbangPol dan sebagainya.
- III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Badan KesbangPol serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019.
- IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan KesbangPol

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan KesbangPol tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan KesbangPol berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan KesbangPol tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan KesbangPol tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan KesbangPol mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan KesbangPol dan/atau realisasi APBD untuk Badan KesbangPol.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan KesbangPol; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan KesbangPol tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan KesbangPol, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol dan Pencapaian Renstra Badan KesbangPol sampai dengan Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol dan Pencapaian Renstra Badan KesbangPol s/d Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran								
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor Badan KesbangPol	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	23 unit	5 unit	4 unit	5 unit	21,73%	4 unit	14 unit	60,9%
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4	9 unit(1 unit kend roda 4, 8 unit kend roda 2)	0	2	0	0	9 unit (1 unit kend roda 4, 8 unit kend roda 2)	0	
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop, infokus, printer, sound system dan lain-lain	25 unit	0 unit	6 unit	8 unit	133%	11	11 unit	76%
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu	80 unit	0 unit	6 unit	31 unit	516%	0	31 unit	38,8%
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/ berkala	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	66,7%
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur								
X	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Badan KesbangPol	160 stel	38 stel	0 stel	0 stel	100%	0	38 stel	23,8%
		03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian dinas adat Badan KesbangPol	120 stel		0 stel	0 stel	100%	0	0	0
X	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan SDM aparatur								
X	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman eserta diklat bagi aparatur	90 paket	0 paket	2 paket	2 paket	100%	1 paket	3 paket	3,3%
		05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terbaru	6 kali	0 kali	1 kali	0 kali	0	1 kali	1 kali	16,7%

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	xx	06								
X	xx	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat perkembangan sistem pelaporan					
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja Badan KesbangPol	120 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
				Urusan Wajib						
19	01	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wasbang					
19	01	17	01	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Terbentuknya Tim FKUB dan terlaksananya koordinasi dalam upaya kerukunan kehidupan beragama	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
19	01	17	02	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tentang solidaritas dan Ikatan sosial di kalangan masyarakat	15 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%
19	01	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM)	Terlaksananya Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakatn (FKDM)	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
19	01	17	04	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Pemuda, Ormas, LSM terhadap Wawasan Kebangsaan	39 kali	2 kali	3 kali	3 kali	100%
19	01	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Outcome Program Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
19	01	18	01	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Terbentuknya Tim Pakem	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
19	01	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan dan fasilitasi pembangunan monumen bela Negara	15 kali	0 kali	3 kali	1 kali	33,3%	3 kali	4 kali	26,67%
19	01	18	03	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya dalam rangka peringatan Hari Bela Negara pada 7 titik sejarah PDRI/ peringatan situjuah	42 kali peringatan peristiwa sejarah	7 kali peringatan peristiwa sejarah	7 kali peringatan peristiwa sejarah dan 1 kali sosialisasi	7 kali peringatan peristiwa sejarah dan 2 kali sosialisasi	100%	7 kali peringatan peristiwa sejarah	21 kali peringatan peristiwa sejarah dan 2 kali sosialisasai	50%
19	01	18	04	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Terciptanya rasa aman dan Ketentraman di tengah masyarakat Kab. Lima Puluh Kota	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50%
19	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terlaksannaya Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat								
19	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Berkurangnya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Keras ditengah Masyarakat	31 kali	4 kali	4 kali	3 kali	75 %	4 kali	11 kali	35,48%
19	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat								
19	01	21	01	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Terlaksannanya penyuluhan politik terhadap masyarakat	26 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 %	9 kali	13 kali	50%
19	01	21	02	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	4 paket	0 paket	1 paket	0	0	1 paket	1 paket	25%
19	01	21	03	Koordinasi Forum-forum diskusi Politik	terwujudnya koordinasi forum-forum diskusi dan terlaksananya verifikasi Bantuan Keuangan kepada	60 Parpol	10 Parpol	10 parpol	10 parpol	100%	10 Parpol	30 parpol	50%

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Parpol											
19	01	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Terlaksananya monitoring untuk 13 kecamatan	150 set	0 set	0	0	0	0		
19	01	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Dalam bagian ini, badan Kesbang Pol mempunyai pelayanan terhadap Penerbitan Izin Penelitian kepada mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir dilapangan, penerbitan surat keterangan Partai Politik dan penerbitan surat keterangan terdaftar organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan							8	3	2		
2.	Penerbitan Surat Keterangan Partai Politik							1	3	-		
3.	Penerbitan Rekomendasi Penelitian							397	350	360		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan KesbangPol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
 1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 2. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.

4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
 4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan KesbangPol dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD (Tahun 2019)						Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2020)					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					
1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	Tersedianya jasa surat menyurat dan kelengkapannya	12 bulan	3.150	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	Terlaksananya Penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.307,5	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	34.800	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	36.590	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan	12 bulan	198.345	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	208.262,2	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol	Kebersihan kantor Badan KesbangPol	12 bulan	25.084,5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 bulan	26.338,7	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya ATK	12 bulan	27.772,5	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	12 bulan	29.161,1	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan KesbangPol	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20.829,3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan KesbangPol	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	21.870,8	
7.	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya komponen instalasi penerangan kantor	12 bulan	5.250	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.512,5	
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	4 laptop dan 1 printer	32.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 laptop dan 4 kipas angin	33.600	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	24.635	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	25.866,8	

10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan KesbangPol	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	187.473	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan KesbangPol	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	196.846,7	
1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan KesbangPol	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan KesbangPol		12 bulan		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Tersedia kendaraan dinas operasional	1 unit kendaraan roda empat, 2 unit kendaraan roda 2	352.781,6	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Tersedia kendaraan dinas operasional	2 unit kendaraan roda 2	570.420,7	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 kipas angin, karpet,10 bunga,4 printer, 1 kamera, 1 alat perekam	34.500	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 set bunga, 2 printer, 3 bh alat perekam	36.225	
3	Pengadaan mebeleur	Badan KesbangPol	Terlaksananya pengadaan mobeuleur gedung kantor	1 set kursi tamu, 2 meja kerja dan 5 kursi kerja	28.000	Pengadaan mebeleur	Badan KesbangPol	Tersedianya mobeuleur kantor	1 set kursi tamu	29.400	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	Pemasangan pavingblock, pembuatan kamar mandi, perbaikan plavon, pembuatan parker roda 2	45.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	47.250	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Terlaksananya pemeliharaan rutin/service kendaraan dinas/ oparisional	12 bulan	100.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Terlaksananya pemeliharaan rutin/service kendaraan dinas/ oparisional	12 bulan	105.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Pemeliharaan, service dan suku cadang peralatan kantor	12 bulan	10.300	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	10.815	
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat disiplin aparatur			Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat disiplin aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan KesbangPol	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	40 stel	17.500	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan KesbangPol	Tersedianya pakaian dinas aparatur	40 stel	18.375	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan KesbangPol	Terlaksananya pengadaan pakaian daerah	40 stel pakaian daerah	17.500	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan KesbangPol	Terlaksananya pengadaan pakaian daerah	-	18.375	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan KesbangPol	Peningkatan SDM aparatur			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Peningkatan SDM aparatur			
1.	Pendidikan dan pelatihan	Badan	Terlaksananya pengiriman	10 paket	35.000	Pendidikan dan	Badan	Terikutinya pendidikan dan	5 paket	36.750	

	formal	KesbangPol	peserta diklat bagi aparatur			pelatihan formal	KesbangPol	pelatihan formal bagi aparatur sesuai tugas dan fungsi			
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terbaru	1 kali	18.255	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan t	1 kali	19.167,7	
1.2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat perkembangan sistem pelaporan			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat perkembangan sistem pelaporan			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan KesbangPol	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20 dokumen	45.075	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan KesbangPol	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20 dokumen	47.328,7	
2.	Urusan Wajib										
2.1	Program Pengembangan wawasan kebangsaan		Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wasbang			Program Pengembangan wawasan kebangsaan		Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wasbang			
1.	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Badan KesbangPol	Terbentuknya Tim FKUB dan terlaksananya koordinasi dalam upaya kerukunan kehidupan beragama serta terlaksananya Penyuluhan FKUB	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 240 orang	222.049,5	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Badan KesbangPol	Terbentuknya Tim FKUB dan terlaksananya koordinasi dalam upaya kerukunan kehidupan beragama serta terlaksananya penyuluhan FKUB	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	233.151,9	
2.	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Badan KesbangPol	Terlaksananya Diksar Bela Negara, Bimtek Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara dan sosialisasi Forum Pembauran kebangsaan	400 orang	412.722,5	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Badan KesbangPol	Terlaksananya sosialisasi forum pembauran kebangsaan	100 orang	433.358	
3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum)	Badan KesbangPol	Terbentuknya Tim FKDM dan Tim Penanganan Konflik Sosial serta terlaksananya Sosialisasi FKDM	20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 150 orang	187.374,5	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Badan KesbangPol	Terbentuknya Tim FKDM dan Tim Penanganan Konflik Sosial, serta terlaksananya rapat-rapat ti	20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	196.743,2	
4.	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Badan KesbangPol	Peningkatan Pemahaman Pemuda, Ormas, LSM terhadap Wawasan Kebangsaan	4 angkatan (200 orang)	129.975	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan Pemahaman Pemuda, Ormas, LSM terhadap Wawasan Kebangsaan	3 angkatan (150 orang)	136.473,7	
5.	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Badan KesbangPol	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Cinta Tanah Air dan Bela Negara	1 angkatan (950 orang)	509.067,5	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Cinta Tanah Air dan Bela Negara	1 angkatan (950 orang)	534.520,8	
2.2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1.	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum	Kab. Lima Puluh	Terbentuknya Tim Pakem dan terlaksananya koordinasi	12 laporan/rekom	499.387,6	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh	Kab. Lima Puluh	Terbentuknya Tim Pakem dan terlaksananya koordinasi	12 laporan/rekom	524.356,9	

	Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Kota	mengenai perkembangan aliran kepercayaan dan sosialisasi Pakem	endasi kepada kepala daerah dan 30 orang		dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Kota	mengenai perkembangan aliran kepercayaan masyarakat dan sosialisasi pakem	endasi kepada kepala daerah dan 30 orang		
2.	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Diskusi Pemantapan 4 Konsensus dan Bimtek 4 pilar	12 angkatan (600 orang)	747.322	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Diskusi pementapan 4 konsensus	3 angkatan (150 orang)	784.688,1	
3.	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya dalam rangka peringatan Hari Bela Negara pada 7 titik sejarah PDRI	7 lokasi titik sejarah PDRI	321.394	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya dalam rangka peringatan Hari Bela Negara pada 7 titik sejarah PDRI	7 lokasi titik sejarah PDRI	337.463,7	
4	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kab. Lima Puluh Kota	Terbentuknya Tim Kominda guna terciptanya rasa aman dan ketentraman di tengah masyarakat Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	485714,5	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kab. Lima Puluh Kota	Terbentuknya Tim Kominda guna terciptanya rasa aman dan Ketentraman di tengah masyarakat Kab. Lima Pluh Kota dan rapat-rapat tim	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	510.000,2	
2.3	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Berkurangnya peredaran/penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat					Berkurangnya peredaran/penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat			
1	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba</i>	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	6 angkatan (180 orang)	82.117,5	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan narkoba dan minuman keras	5 angkatan (125 orang) dan kec. Mungka	86.223,3	
2.4	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			Program Pendidikan Politik Masyarakat		Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			
1	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan politik terhadap masyarakat	13 kecamatan (540 orang) dan 2 angkatan (160 orang)	235.647	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan politik terhadap masyarakat	13 kecamatan (540 orang) dan 1 angkatan (100 orang)	247.429,3	
2	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	Fasilitasi PAW DPRD Kab. Lima Puluh Kota	7.351	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	Fasilitasi PAW DPRD Kab. Lima Puluh Kota	7.718,5	
3	Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	terwujudnya koordinasi forum-forum diskusi dan terlaksananya verifikasi Bantuan Keuangan kepada Parpol serta diskusi Peraturan Ormas dan bantuan keuangan Parpol	10 Partai Politik dan 3 angkatan (175 orang)	1.016,4	Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	terwujudnya koordinasi forum-forum diskusi dan terlaksananya verifikasi Bantuan Keuangan kepada Parpol	10 Partai Politik dan 2 angkatan (85 orang)	1.067.276,1	
4	Penyusunan Data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya Penyusunan data base partai Politik	150 buah buku		Penyusunan data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya penyusunan data base Partai Politik	150 buah buku	20.668	

		Kota					Kota				
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kab. Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	97.905	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	13 kecamatan	102.800,2	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan KesbangPol berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2019, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk Badan KesbangPol adalah Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba. Hal ini mengingat pada akhir-akhir ini masalah pengedaran penyalahgunaan narkotika psikoterapi dan zat adiktif lainnya di masyarakat sangat banyak, maka sangat penting dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan napza. Dari hasil sosialisasi kegiatan dan pemantuan kelapangan diperoleh informasi dan masalah-masalah dari tokoh masyarakat, LSM dan para tokoh pemuda bahwa mereka mengharapkan agar kegiatan sosialisasi tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pada saat ini telah terjadi penurunan moral Pancasila dan tata krama ditengah-tengah masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda dan pelajar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa.
2. Memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
3. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan.
5. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat, dan terpercaya.
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

9. Melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan KesbangPol harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan KesbangPol

Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Masyarakat
3. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Terwujudnya Situasi dan Kondisi Politik yang Demokratis

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya kesadaran, Pemahaman, Pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuannya : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)
- b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
- c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
- d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuan : Meningkatnya Kemitraan Pengembang Wawasan Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)
- b. Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- c. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- d. Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Tujuan : Penurunan Penyakit Masyarakat

Kegiatan- kegiatan yang dilakukakn antara lain :

- a. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuannya : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
- b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol
- c. Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik

5. Program pelayanan administrasi perkantoran

Tujuannya : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tujuannya : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mobeuleur
- d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Program peningkatan disiplin aparatur

Tujuannya : Meningkatnya disiplin aparatur

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tujuannya : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur,

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuannya : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Badan KesbangPol.
3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan KesbangPol.
5. Meningkatnya pengetahuan ormas dan parpol serta tokoh masyarakat tentang pengetahuan politik.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila.
7. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan muspida dan instansi vertikal lainnya mengenai stabilitas daerah dan aliran kepercayaan.
8. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penurunan pekat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan napza.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Badan KesbangPol untuk Rencana Kerja Badan KesbangPol tahun 2019 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Badan KesbangPol tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan KesbangPol dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Kegiatan jasa administrasi keuangan 4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pengadaan Mebeuler 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.	Peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
4.	Peningkatan kapasitas sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

	daya aparatur	
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.3.2

Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	PROGRAM	KEGIATAN
I	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB) 2. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat 3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
II	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 2. Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wasbang 3. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wasbang 4. Koordinasi dan Fasilitasi Kominda
III	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba
IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyuluhan politik kepada masyarakat 2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan parpol 3. Koordinasi Forum-forum diskusi

		politik 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perkembangan politik
--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengelompokan Program Badan Kesbangpol yaitu Program dan Kegiatan Rutin SKPD, dan Program yang merupakan Urusan Wajib SKPD, maka pada Tahun 2019 Badan KesbangPol melaksanakan 9 program dengan 34 kegiatan.

Uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran dan program kegiatan Badan KesbangPol Tahun 2019 adalah Tabel berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD								
1	19	xx	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran			475.266.520				587.306.360
1	19	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	Kesbang Pol	12 bulan	3.150.000	DAU		12 bulan	3.307.500
1	19	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kesbang Pol	12 bulan	34.800.000	DAU		12 bulan	36.540.000
1	19	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Kesbang Pol	12 bulan	181.400.000	DAU		12 bulan	208.262.250
1	19	xx	01	08	Penyediaan Jasa	Terpenuhinya	Kesbang	12 bulan		DAU		12	

					Kebersihan Kantor	kebutuhan jasa kebersihan Kantor	Pol		23.487.500			bulan	26.338.725
1	19	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	Kesbang Pol	12 bulan	25.122.500	DAU		12 bulan	29.161.125
1	19	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kesbang Pol	12 bulan	17.663.000	DAU		12 bulan	21.870.818
1	19	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kesbang Pol	12 bulan	5.250.000	DAU		12 bulan	5.512.500
1	19	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kesbang Pol	1 laptop dan 4 kipas angin	28.000.000	DAU		unit	33.600.000
1	19	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	Kesbang Pol	12 bulan	24.200.000	DAU		12 bulan	25.866.750
1	19	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	Kesbang Pol	12 bulan	132.193.520	DAU		12 bulan	196.846.692
1	19	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kesbang Pol		168.000.000				599.110.706
1	19	xx	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kesbang Pol	2 unit kendaraan roda 2	44.600.000	DAU		3 unit kendaraan roda 2	370.420.706
1	19	xx	02	09	Pengadaan	Terlaksananya	Kesbang	10 set	14.000.000	DAU		unit	36.225.000

					peralatan gedung kantor	pengadaan peralatan gedung kantor	Pol	bunga, 2 printer, 3 alat perekam						
1	19	xx	02	10	Pengadaan Mobeuleur	Tersedianya mebeuleur gedung kantor	Kesbang Pol	1 set kursi tamu	8.000.000	DAU		Meja kerja, lemari arsip, kursi putar dan kursi tamu	29.400.000	
1	19	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kesbang Pol	Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000	DAU		1 unit	47.250.000	
1	19	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan/service kendaraan dinas/operasional	Kesbang Pol	12 bulan	88.650.000	DAU		12 bulan	105.000.000	
1	19	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kesbang Pol	12 bulan	7.750.000	DAU		12 bulan	10.815.000	
1	19	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas	Kesbang Pol		35.000.000			-	36.750.000	
1	19	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	Kesbang Pol	40 stel	17.500.000	DAU		40 stel	18.375.000	

x	xx	xx	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu aparatur	Kesbang Pol	-	17.500.000	-		40 stel	18.375.000
1	19	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur untuk menunjang kapasitas aparatur	Kesbang Pol		53.225.000				55.917.750
1	19	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sesuai tugas dan fungsi	Kesbang Pol	5 Paket	35.000.000	DAU		5 paket	36.750.000
1	19	xx	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbang Pol	1 kali	18.225.000	DAU		1 kali	19.167.750
1	19	xx	06		Program Peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			43.215.000			-	47.328.750
1	19	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kesbang Pol	20 dokumen	43.215.000	DAU		20 dokumen	47.328.750
												-	-
1					URUSAN WAJIB								
1	19				Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							-	-

1	19	xx	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota		222.345.060	DAU		-	999.727.575
1	19	xx	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Terbentuknya Tim FKUB dan terlaksananya koordinasi dalam upaya kerukunan kehidupan beragama	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	74.735.000	DAU	Pemantauan terhadap kehidupan keagamaan dan kewaspadaan terhadap aliran sesat, dasar hukumnya Perbup No. 10 Th 2012 Ttg Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah di Lima Puluh Kota	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	233.151.975
1	19	xx	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi forum pembauran kebangsaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 orang	42.309.800	DAU	Dasar hukumnya Keppres No. 28 Th.2006 tentang Hari Bela Negara dan rangkain peristiwanya di Kab. Lima Puluh Kota dan Permendagri No. 34 Th. 2006 Ttg Pedoman	3 angkatan	433.358.625

											pembentukan forum pembauran kebangsaan		
1	19	xx	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terbentuknya Tim FKDM dan Tim Penanganan Konflik Sosial dan terlaksananya rapat-rapat Tim	Kab. Lima Puluh Kota	20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	46.884.690	DAU	Dasar hukumnya Permendagri No. 12 Th 2006 Ttg Kewaspadaan dini masyarakat di daerah	13 kecamatan	196.743.225
1	19	xx	17	05	Kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan	Peningkatan pemahaman pemuda, ormas, LSM terhadap wawasan kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	3 angkatan (150 orang)	58.415.570	DAU	Dasar hukumnya Keppres No. 28 Th 2006 Ttg Hari Bela Negara, Perbup No. 34 Th 2010 Ttg Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kab. Lima Puluh Kota serta pelaksanaan diksar bela Negara	3 angkatan	136.473.750
1	19	xx	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Outcome Program Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota		727.733.440	DAU		-	2.156.509.005

1	19	xx	18	01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Terbentuknya Tim Pakem dan terlaksanannya koordinasi mengenai perkembangan aliran kepercayaan dan sosialisasi Pakem	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 30 orang	393.288.200	DAU	Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994	13 kecamatan	524.356.980
1	19	xx	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Diskusi Pemantapan 4 Konsensus	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 angkatan (150 orang)	31.952.500	DAU	Perlu dilakukan sosialisasi dan Bimtek PDRI karena semakin menipisnya rasa cinta terhadap tanah air, dasar hukumnya Keppres No. 28 Th 2006 dan Perbup No. 34 Th. 2010	6 kecamatan	784.688.100
1	19	04	18	03	Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam rangka peringatan hari Bela Negara pada di 7 titik sejarah PDRI	Kabupaten Lima Puluh Kota	7 lokasi titik sejarah PDRI	160.000.000	DAU	Perbup No. 34 Th. 2010 Tentang Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa Sejarah di Kab. Lima Puluh Kota	7 lokasi titik sejarah PDRI	337.463.700
1	19	04	18		Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Terbentuknya Tim Kominda guna terciptanya rasa aman dan ketentraman di tengah masyarakat Kab. Lima Puluh	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	142.492.740	APBD	Dasar hukumnya Permendagri No. 16 Tahun 2011 Ttg Perubahan Permendagri	-	510.000.225

						Kota dan rapat-rapat tim					No. 11 Th. 2006 Ttg Komunitas Intelijen Daerah dan Perbup No. 12 Th. 2012 Ttg Komunitas Intelijen Daerah		
1	19	xx	21		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penurunan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kab. Lima Puluh Kota		28.685.290	DAU		-	86.223.375
1	19	xx	21	01	Penyuluhan Pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kab. Lima Puluh Kota	5 angkatan (125 orang)	28.685.290	DAU	Permendagri No. 21 Th. 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Reses DPRD	Kab. Lima Puluh Kota	86.223.375
1	19	xx	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota		976.369.750	DAU		-	1.425.224.325
1	19	xx	21	01	Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Terlaksanannya penyuluhan politik terhadap masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	13 Kecamatan (540 orang) dan 1 angkatan (100 orang)	141.080.000	DAU		13 Kecamatan	247.429.350
1	19	xx	21	02	Fasilitasi Penyelesaian	Terwujudnya penyelesaian	Kab. Lima Puluh	Fasilitasi PAW	6.945.250	DAU		Kab. Lima	7.718.550

					Perselisihan Parpol	perselisihan parpol	Kota	anggota DPRD Kab. Lima Puluh Kota				Puluh Kota	
1	19	xx	22	03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Terlaksananya verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol serta diskusi Peraturan Ormas dan bantuan keuangan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	10 partai politik dan 2 angkatan (85 orang)	689.688.500	DAU		Kab. Lima Puluh Kota	1.067.276.175
1	19	xx	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Terwujudnya Penyusunan Data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	150 buah buku	-	DAU			
1	19	xx	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Terlaksananya monitoring evaluasi dan terpantaunya perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	138.656.000	DAU		Kab. Lima Puluh Kota	102.800.250
					JUMLAH				2.730.840.060				5.994.097.846

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Program Tahunan** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan bangsa dan Politik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesbang Pol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesbang Pol, dengan cara memberi

dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kesbang Pol dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbang Pol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal September 2018

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

